



SKRIPSI

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
SEBAGAI WAKIL DAERAH DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

***LEGAL STANDING THE REPRESENTATIVE OF REGIONAL
IN CONTITUTIONAL SYSTEM BY INDONESIAN OF
REPUBLIC***

**YOUNGKY ANDRE PRATAMA
070710101079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
SEBAGAI WAKIL DAERAH DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

***LEGAL STANDING THE REPRESENTATIVE OF REGIONAL
IN CONTITUTIONAL SYSTEM BY INDONESIAN OF
REPUBLIC***

**YOUNGKY ANDRE PRATAMA
070710101079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

**"KESUKSESAN BUKAN BAGAIMANA KITA
MENGAWALI AKAN TETAPI BAGAIMANA KITA
MENGAKHIRI"¹**

¹ Harry Tanoesoedibjo, Direktur Utama, MNC Grup

PERSEMBAHAN

Tulisan ini akan penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Drs Siswahyu Indra Purnama yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi serta bekerja tanpa lelah untuk anak-anaknya serta kepada lumbung maafku serta ahli surgaku Ibunda Dra Leginingsih, MM yang tidak pernah berkata tidak kepada anak-anaknya dan selalu mengajarkan semangat untuk meraih impian serta cita-cita.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI
WAKIL DAERAH DI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

***LEGAL STANDING THE REPRESENTATIVE OF REGIONAL
IN CONTITUTIONAL SYSTEM BY INDONESIAN OF
REPUBLIC***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

YOUNGKY ANDRE PRATAMA

070710101079

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Pembimbing,

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985121 001

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.

NIP. 19700410199802 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI
WAKIL DAERAH DI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**

***LEGAL STANDING THE REPRESENTATIVE OF REGIONAL IN
CONTITUTIONAL SYSTEM BY INDONESIAN OF REPUBLIC***

Oleh :

YOUNGKY ANDRE PRATAMA
070710101079

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

R.A RINI ANGGARAINI, S.H., M.H.

NIP. 19591115 198512 1 001

IWAN RACHMAD S, S.H.,M.H.

NIP. 19700410 19980 2 001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : Juli

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

IDA BAGUS OKA A, S.H., M.M.
NIP. 19601122198902 1 001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H
NIP. 19780531200501 2 001

Anggota Penguji :

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 19591115 198512 1 001

.....

IWAN RACHMAD S, S.H.,M.H.
NIP. 19700410 19980 2 001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Youngky Andre Pratama

NIM : 070710101079

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Wakil Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2013

Yang menyatakan,



Youngky Andre Pratama
NIM 070710101079

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI WAKIL DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu R.A Rini Anggarini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan nasehat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai Ibu rumah tangga sekaligus akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak, Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahtana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan

Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember selaku pembina IMA HTN: Bapak Iwan Rachmad S. S.H., M.H., Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., Bapak Dr Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Ibu R.A Rini Anggraini S.H., M.H., dan Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H.,
8. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Saudara-saudaraku, Adikku bungsu Bobby Andi Septian beserta Fitri Lailatul alias ela.
10. Sahabat-sahabatku serta rekan seperjuangan di Bumi Tegal Boto Boim, Aditiya Handie S, Anak Agung Gede HJ, Citra Multikasari, Mei Devi R., Arief Projodikoro, Arman, Febri Syarif alias mbah, Ardi Gurami alias Patelo, Teguh Ming, Andrian Maraharlis dan Chevroliansa Sanjaya, yang telah memberi warna baru dalam suasana suka maupun duka ditengah penat yang melanda disaat kuliah.
11. Teman-temanku di Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember : Sanoë, Tantra, Sony Ferianda, Rio Budi, kangen futsal bareng rek.
12. Temen-temen kontrakan ku : Bagus, Sinyo, Boy, Cingur, Gundul, Aries, Rizky dan tentu saja pemilik kontrakan Bapak Dr Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., beserta ibu terima kasih untuk hari-harinya.
13. Keluarga Besar IMA HTN : Nandhu, Lidya, Topek, Imron, Ade babi, Andik Jugling, Abi, Ali Jhon, Aang, Libbi, owob serta special thank to my Brother Rio Prihatnolo, S.H., kangen buat iven lagi rek see you next time ya.
14. Kelompok Magang ku di Kantor Pertanahan Jember : Lidya, Risha, Boim, Arief Bekti, Anggita Maresti, Rastra, Sofan, Dokar, kangen suasana magang rek.

15. Adik-adiku yang selalu memberiku senyum dan semangat : Dila, Nayla, Nail, Muhaimin Sari dan Arshi.
16. Keluarga Besar ABADE (Akuntansi B Dua ribu Enam) yang selalu memberiku kenangan terindah dan arti sebuah kata persahabatan : Yose Rizal Sarifullah, Meilani Kartika, Novianto, Atika Bunga S, Bisma Harinanda, Aan Kurniawan, Arief Hidayat, Saiful Arifin, Huzaifah H dan Mega DIP.
17. Keluarga Besar Komunitas satu Darah ku Juventus Club Indonesia serta tempatku dibesarkan Juventus Club Indonesia Chapter Jember selalu merindukan tribun curva sud
18. Untuk some one yang biasa ku panggil Panda terima kasih untuk semangat serta motivasinya selama ini.
19. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan YME menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 2013

Penulis

RINGKASAN

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu isue strategis di dalam era reformasi lembaga negara dewasa ini. Perubahan sistem perlemen yang lebih mengarah kepada sistem *becameral* menjadi alternative atau pemikiran baru untuk menampung aspirasi daerah yang tentu saja bertujuan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu Penghapusan dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) serta adanya jaminan pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya sebagai wujud kedaulatan rakyat serta adanya ketegasan dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan tuntutan perkembangan pada era reformasi yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Daerah memerlukan sebuah lembaga negara yang mampu menjadi wakil daerah tersebut, sehingga apa yang menjadi aspirasi daerah yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana dan semestinya. Selain itu diperlukannya sebuah lembaga negara yang dapat mengawasi secara langsung jalannya otonomi daerah agar penyimpangan kewenangan otonomi oleh daerah tidak terjadi. Maka dari hal tersebut penulis mengangkat judul **“KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI WAKIL DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal pertama, Bagaimanakah wewenang Dewan Perwakilan Daerah terhadap daerah di Indonesia? dan Bagaimanakah mekanisme penyampaian aspirasi daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tugas Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami Untuk mengkaji serta menganalisis tentang wewenang Dewan Perwakilan Daerah terhadap pelaksanaan daerah. Dan juga menganalisis tentang proses penyampaian aspirasi Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tugas Dewan Perwakilan Daerah sebagai kurier pembawa aspirasi daerah. Metodologi yang digunakan yaitu terdiri

dari tipe penelitian secara yuridis normatif; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum; dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, **Pertama** bahwa wewenang dalam fungsi pengawasan, DPD melakukan pengawasan terhadap jalannya undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut yang nantinya dapat dijadikan bahan penyusunan Rancangan Undang-undang yang akan di ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian wewenang dalam fungsi legislasi. Yaitu menyusun Rancangan Undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, ikut membahas Rancangan Undang-undang terkait sampai kepada proses pengesahan, menyampaikan hasil rancangan undang-undang terkait baik dalam bentuk draft maupun perkembangan pembahasan melalui Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah. **Kedua**, aspirasi daerah dalam fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan rapat kordinasi dengan unsur di daerah yang Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mendengarkan pendapat terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang nanti akan dibawa dan disampaikan di dalam rapat tahunan Dewan Perwakilan Daerah terkait evaluasi pelaksanaan Undang-undang terkait.

Saran dari skripsi ini adalah Pada dasarnya sistem becameral bertujuan untuk menjamin adanya *check and balances* bukan untuk mengurangi kewenangan salah satu lembaga negara yang ada. Sehingga penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dapat menjadi prioritas utama dalam pembahasan

amandemen V Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi Keberadaan sistem bicameral bukan merupakan sebuah ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetapi justru di dalam sistem demokrasi modern penampungan aspirasi masyarakat daerah seharusnya lebih diperhatikan agar pada nantinya aspirasi masyarakat daerah dapat tertampung pada tempatnya sehingga masyarakat tidak mencari jalan sendiri dalam penyampaian aspirasi tersebut. Konflik horisontal antar kelompok masyarakat pun dapat diredam sedini mungkin dengan memperhatikan keinginan masyarakat daerah yang berbeda dan beragam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penulisan	5
1.3.1.Tujuan Umum.....	5
1.3.2.Tujuan Khusus	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5.Metode Penelitian	6
1.5.1.Tipe Penelitian	6
1.5.2.Pendekatan Masalah	7
1.5.3.Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1.Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.3.2.Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3.Bahan Non Hukum.....	8
1.5.4.Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Negara Hukum.....	10
2.2. Sistem Ketatanegaraan	14
2.2.1. Sebelum Amandemen Undang-undang Dasar	14
2.2.2. Setelah Amandemen Undang-undang Dasar	18
2.3. Lembaga Negara.....	21
2.4. Lembaga Legislatif	23
2.4.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat	24
2.4.2. Dewan Perwakilan Rakyat	27
2.4.3. Dewan Perwakilan daerah.....	29
2.5. Check and Balances.....	31
BAB 3. PEMBAHASAN	32
3.1. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia	33
3.1.1. Konsep Becameral di Indonesia.....	33
3.1.2. Wewenang Legislasi Dewan Perwakilan Daerah	38
3.1.3. Wewenang Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah	41
3.2. Penyampaian Aspirasi Daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah	43
3.2.1. Alasan Pentingnya Aspirasi Daerah	45
3.2.2. Aspirasi Daerah dalam fungsi Legislasi.....	52
3.2.3. Aspirasi Daerah dalam fungsi Pengawasan	55
BAB 4. PENUTUP.....	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran	60

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN